



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Agustus 2024/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA BIMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERI SOFIYAN
2. Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 401109

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.622.000.000
1. Tanah Seluas 4495 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , WARISAN Rp. 670.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 1.570.000.000		
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000		
4. Tanah Seluas 7864 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000		
6. Tanah Seluas 442 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	400.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW FORTUNER 4X22.7SRZATTRD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.043.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.043.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.